

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, terletak memanjang digaris khatulistiwa, diantara dua benua dan dua samudera, oleh karena itu mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, Transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.

Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Peranan transportasi yang semakin vital, maka angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, disamping harus ditata dengan moda transportasi laut dan udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai danau dan penyeberangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tetap, serasi, seimbang, terpadu dan sinergi antara satu dengan lainnya.

Peranan angkutan jalan yang memiliki nilai penting dan strategis karena mempunyai bentuk hidup yang banyak maka angkutan jalan ditata dalam

negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dalam pengembangannya juga melibatkan swasta

Penyelenggaraan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Dari kondisi tersebut pemerintah membutuhkan suatu sistem transportasi massal yang tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien merupakan pilihan yang ditetapkan dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan. Pengembangan transportasi perkotaan juga mengemban misi bahwa angkutan perkotaan haruslah mampu mengurangi gangguan lalu lintas, maupun mengurangi kemacetan, mampu mengurangi gangguan lalu lintas, mampu mempertahankan kualitas lingkungan, serta terjangkau oleh semua lapisan pemakai jasa transportasi.

Angkutan kota dalam hal ini bus perkotaan dalam penyelenggaraannya seharusnya sistem jaringan jalan dalam kota terintegrasi dengan sistem jaringan jalan antar kota, dengan demikian maka transportasi dalam kota dapat berfungsi dengan baik dalam melayani aktifitas lokal maupun dalam melayani daerah sekitarnya. Agar transportasi perkotaan mencapai tingkat efisiensi dan kualitas pelayanan yang tinggi maka harus berfungsi mengembangkan

keterpaduan antar dan intramoda, sesuai dengan tata ruang kota serta pemanfaatan ruang jalur koridor transportasi massal sebagai pusat kegiatan baru.

Angkutan kota atau jalan raya (bus perkotaan) adalah sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat kota dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kota pada umumnya. Keberadaan angkutan kota sangat dibutuhkan tetapi apabila tidak ditangani dengan baik dan benar, akan merupakan masalah bagi kehidupan kota.

Permasalah-permasalah secara umum yang dihadapi transportasi perkotaan antara lain:<sup>1</sup>

1. Pertumbuhan kebutuhan transportasi sering tidak seimbang dengan penyedia prasarana
2. Kualitas dan jumlah angkutan umum yang belum memadai sarana dan prasarana, jaringan jalan dan jaringan trayek, terminal, sistem pengendalian pelayanan angkutan umum belum berhasil di tata secara konsepsional.
3. Makin jauhnya jarak perjalanan harian masyarakat.
4. Penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien.
5. Di daerah perkotaan timbul kemacetan, kesemrawutan, dan pencemaran lingkungan.

<sup>1</sup> Muslich Zainal Asikin, *Sistem Manajemen Transportasi Kota*, Philosophy Pres Fak Filsafat UGM dengan Abhinava, Yogyakarta hal 10

Sehingga kebutuhan akan transportasi merupakan suatu masalah yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Khususnya transportasi yang bergerak pada bidang angkutan jalan raya merupakan permasalahan yang paling penting dalam bidang transportasi

Dikarenakan angkutan jalan raya merupakan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau semua masyarakat masyarakat yang bergantung pada kebutuhan angkutan jalan raya sehingga pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengatur tentang permasalahan transportasi termasuk angkutan jalan raya, hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan “cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kebutuhan akan adanya transportasi dalam bidang angkutan jalan raya yang nyaman, lancar, aman, efektif, dan efisien merupakan harapan, keinginan dan dambaan bagi semua masyarakat.

Dalam pembangunan transportasi, pemerintah mempunyai peran sebagai pembina, sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan<sup>2</sup>

Sciring dengan intensitas yang tinggi dari kehidupan di perkotaan ini membutuhkan dukungan program dan sarana transportasi yang memadai

untuk memungkinkan terjadinya mobilitas aktivitas penduduk kota secara efektif dan efisien. Angkutan jalan raya terutama angkutan bus perkotaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kota sehingga sudah menjadi kebutuhan pokok, ini di karenakan angkutan bus perkotaan menjadi *consumption* dari masyarakat luas termasuk juga kota Yogyakarta.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, kota Yogyakarta membutuhkan sarana transportasi. Hal ini sangat vital karena sebagai sarana penghubung wisatawan yang mengunjungi lokasi-lokasi wisata yang potensial. Namun belakangan ini muncul kekhawatiran terhadap kondisi transportasi di kota Yogyakarta yang semakin menurun pelayanannya, sehingga membawa citra buruk bagi dunia pariwisata.

Padahal sektor jasa pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan baik tidaknya pelayanan dan juga keindahan, sementara sarana transportasi perkembangannya untuk mendukung bisnis pariwisata belum memadai. Keberadaan angkutan bus perkotaan di kota Yogyakarta dapat menjadi cermin buruknya sistem transportasi, bahkan juga dianggap wisatawan sebagai cermin masyarakat kota Yogyakarta<sup>3</sup>

Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas kota khususnya kota Yogyakarta juga sangat mempengaruhi kualitas dan masalah yang ditimbulkan oleh angkutan bus perkotaan. Hal ini disebabkan karena pelayanan angkutan bus perkotaan sangat mendukung pada semua kegiatan masyarakat terutama yang menggunakan jasa angkutan bus perkotaan. Sehingga dari masalah

<sup>3</sup> Bambang Dikandi S.E. 2002. Diakses KB. <http://www.diponegoro.ac.id>

tersebut akan semakin banyak pula lembaga atau instansi yang berwenang yang ikut terkait dalam mengatur dan mengelola pelaksanaan angkutan bus perkotaan baik dari pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak swasta yang menjadi pengelola angkutan di kota Yogyakarta yaitu angkutan bus perkotaan.

Tentang keberadaan angkutan umum termasuk angkutan bus perkotaan diatur pemerintah melalui Undang-Undang DLLAJ No.14 Tahun 1992 dan keputusan Dirjen Perhubungan No. 274 / lik.105 / DPRD / Tahun 1996 yang memuat tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Tetapi adanya peraturan tersebut tentu saja belum mampu untuk mengimbangi banyaknya angkutan bus perkotaan beserta masalah-masalahnya sehingga pemerintah melalui menteri perhubungan mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum yaitu dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003, sehingga perusahaan mobil bus umum dalam peranannya yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas harus dijalankan sesuai izin dan trayek yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Begitu juga dengan keberadaan angkutan umum yaitu angkutan bus perkotaan di kota Yogyakarta, dalam pelaksanaannya masing-masing kelompok atau pengelola armada bus telah memiliki trayek-trayek yang ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini adalah kewenangan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.10 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 46 yang menyebutkan bahwa, tsedangkan angkutan perkotaan di wilayah perkotaan yogyakarta diatur dalam SK Gubernur Nomor 11/ KEP/2005 Tentang angkutan perkotaan yang beroperasi di wilayah perkotaan yogyakarta. Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peranan sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan angkutan bus perkotaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

- a. Pemantauan operasi angkutan
- b. Evaluasi trayek dan evaluasi izin operasi
- c. Penilaian kinerja angkutan dan kinerja kendaraan
- d. Pengembangan dan perluasan trayek dan izin operasi

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan angkutan bus perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peranan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan angkutan bus di wilayah perkotaan Yogyakarta dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan angkutan bus perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta ?



### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan angkutan bus perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat peranan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan angkutan bus di wilayah perkotaan Yogyakarta dan untuk menemukan dan melaksanakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penyelenggaraan angkutan bus perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta

### D. Tinjauan Pustaka

Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan transportasi hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan lancar.

Pentingnya peranan pengangkutan dalam dapat juga dikatakan meliputi segi ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya:

1. Jika dilihat dari segi politik yaitu seperti untuk tujuan pertahanan maka transportasi memberikan sumbangan yang penting dalam mobilitas dari unsur-unsur pertahanan itu
2. Jika ditinjau dari segi sosial transportasi dapat dianggap sebagai suatu faktor pemersatu bangsa.
3. Dari sudut pandang ekonomi bahwa transportasi dapat memperlancar

Maka dari itu jika terjadi hambatan-hambatan dalam proses transportasi tentunya akan menyebabkan terjadinya gangguan bagi jalannya perekonomian, sebaliknya kalau fasilitas transportasi tersedia dan mencukupi maka diharapkan terjaminnya kelancaran roda transportasi dan atau roda perekonomian.

Setelah diketahui pentingnya peranan pengangkutan maka perlu juga diketahui mengenai arti pengangkutan itu sendiri dan secara sederhana oleh Muhtarudin Siregar bahwa pengangkutan dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan<sup>4</sup>. Unsur-unsur pengangkutan yang terdiri:

- a. Ada muatan yang diangkut
- b. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutan.
- c. Ada jalanan tempat yang dilalui alat angkutan tersebut ( trayek)

Juga dapat dikatakan bahwa proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ketempat tujuan kemana tempat tujuan diakhiri. Karena pengangkutan sebagai kegiatan memindahkan barang atau orang maka pengangkutan menghasilkan jasa-jasa angkutan sebagai produksinya. Dari jasa-jasa yang dihasilkannya ini sektor pengangkutan dapat memberikan kegunaan-kegunaan kepada mereka yang memakai jasa angkutan tersebut.

Dengan adanya pengangkutan dapat diadakan barang-barang dari suatu tempat dimana barang tersebut dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan

<sup>4</sup> Muhtarudin Siregar, *Managemen Pengangkutan*, Berdikari Student Study Club Onton, Jakarta hal 13.

manusia ke tempat dimana barang-barang tadi dirasakan lebih manfaatnya maka dari itu pengangkutan dapat memberikan manfaat nilai atau kegunaan tempat kepada mereka yang menggunakan jasa angkutan tersebut. Misalnya untuk orang yang semula dirumah menganggur karena bepergian naik kendaraan umum ke semarang ditempat yang baru dapat kerja (mencari nafkah). Hal ini dapat terlihat bahwa yang tadinya barang tidak berguna atau orang di rumah hanya menganggur menggunakan jasa transportasi pindah ke tempat lain dapat bermanfaat dan untuk nilai barang dapat bertambah.

Selain pengangkutan membawa nilai tambah maka pengangkutan dapat pula memberi nilai waktu kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa seseorang yang bepergian jalan kaki ke semarang membutuhkan waktu kurang lebih satu setengah hari, dengan menggunakan transportasi angkutan bis umum dapat dicapai kurang lebih 3 jam dari Yogyakarta ke Semarang.

Melihat manfaat tersebut diatas tidak mengherankan apabila kemudian bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan.

Menurut Frank H. Wood Ward ada 3 jenis angkutan yaitu:<sup>5</sup>

1. Angkutan darat.
2. Angkutan laut.
3. Angkutan udara.

Pada saat ini angkutan darat lebih memegang peranan penting dalam masyarakat karena selain murah tarifnya, dapat dijangkau pengguna jasa juga mudah di gunakan.

<sup>5</sup> Frank Wood Ward, *Management Transportasi*, BP, Djakarta, Diterbitkan Dan

Dua jenis angkutan darat:

1. Angkutan darat diatas jalan raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
2. Angkutan diatas rel kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992

Diantara dua jenis angkutan darat yang paling dominan adalah angkutan darat jalan raya yaitu bus karena sampai di setiap pelosok pun ada yaitu angkutan perintis.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan. Angkutan bus kegiatan usahanya menurut pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 yang menyebutkan kegiatan usaha angkutan orang atau barang di kelola oleh: Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi, Perorangan warga negara Indonesia.

Setiap angkutan umum yang beroperasi di kota Yogyakarta ataupun kota lainnya di Indonesia membutuhkan Trayek dan Jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. sedangkan yang dimaksud jaringan trayek adalah merumakan kumpulan dari trayek trayek yang menjadi satu

Konsep kinerja pelayanan angkutan umum mencakup dua arti yaitu efektivitas dan efisiensi yang artinya adalah efektivitas meliputi penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan, sedangkan efisiensi merupakan ukuran penilaian terhadap terhadap cara untuk mencapai hasil akhir tersebut.

Ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap obyektif yang telah ditetapkan. Ukuran efisiensi pada dasarnya untuk meminimalisasi biaya. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu secara internal:

1. banyaknya armada bus yang mengalami kerusakan karena faktor usia mesin yang sudah tua
2. suku cadang mahal harganya

secara eksternal:

1. persaingan tidak sehat antar operator
2. birokrasi administrasi yang terlalu lama.

Melihat kualitas pelayanan dan pelaksanaan angkutan bus perkotaan yang masih sangat jauh dari hadapan kita semua dalam hal ini peranan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diperlukan jika dilihat secara keseluruhan maka kelemahan utama dalam penyelenggaraan angkutan bus perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta adalah pada aspek kelembagaan, aspek manajemen dan teknik operasinya.

Maka dari hal tersebut Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang perhubungan, kewenangan dekonentrasi serta

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud berikut fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan.<sup>6</sup>

**Tugas Pokok :**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, transportasi, keselamatan, teknis operasional, pos dan telekomunikasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

**Fungsi :**

1. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, transportasi, keselamatan, teknis operasional, pos dan telekomunikasi ;
2. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

**Visi**

Terciptanya sistem perhubungan yang handal, lancar, selamat, tertib, efisien dan efektif

**Misi**

1. Meningkatkan kehandalan sistem perhubungan
2. Meningkatkan kelancaran, keselamatan dan ketertiban oprasional perhubungan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan

---

<sup>6</sup> [www.hubdat.go.id](http://www.hubdat.go.id)

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan
5. Meningkatkan peran dan fungsi Dinas perhubungan dalam menunjang peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum dapat dikategorikan suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian hukum yang berdasarkan pada norma hukum yang berlaku dan dengan ditunjang data empiris yang bersifat deskriptif yaitu data yang diperoleh dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitas yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti juga dianalisis dengan penelitian logis.

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data terdiri dari:

###### **a. Penelitian Lapangan**

Bahwa penulis melakukan wawancara terhadap narasumber dan responden dengan mengadakan tanya jawab secara langsung berdasarkan pedoman wawancara

###### **b. Penelitian Kepustakaan**

1. Bahan hukum yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
  - e) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - f) Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:
- a. Buku-buku tentang Hukum Administrasi Negara
  - b. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan
  - c. Artikel-artikel yang berasal dari majalah, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian serta dari internet



### 3. Narasumber

Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pejabat yang berwenang dengan materi penelitian di ajukan penulis

### 4. Responden

Pemilihan responden ditentukan melalui metode non random sampling, yaitu suatu metode sampling di mana tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Dalam hal ini, pemilihan responden dilakukan oleh peneliti secara subyektif sesuai dengan kredibilitas dan kapabilitas responden dalam mendukung jalannya penelitian. Dengan demikian, peneliti memilih 2 operator bus perkotaan dari total 5 operator bus yang beroperasi di wilayah perkotaan Yogyakarta sebagai responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Perum DAMRI Unit Bus Kota sebagai instansi dari pemerintah dan Kop. ASPADA sebagai instansi swasta.

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian akan mengambil lokasi di wilayah perkotaan Yogyakarta

### 6. Analisa hasil

Data yang diperoleh disajikan secara diskriptif dan di analisis secara kualitatif untuk menemukan perubahan atas permasalahan yang ada secara jelas dan lengkap berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian